

ANALISIS SOSIO-EKONOMIS UNTUK EVALUASI LAHAN PERMUKIMAN

Oleh : **Su Ritobardoyo**

ABSTRACT

*A problem which commonly exist take a shape in the discrepancy of physical land suitability and socio-economic suitability. Another problem which also appear, is in the difference delineation of boundary of land unit. From physical point of view the analysis is based on physical boundary, whereas the available socio-economic data employs merely an administrative boundary. The available data contribute also to the mentioned problem. The data of physical aspect has a more quantitative character, in comparison to the data of socio-economic that has a more qualitative character. Those differences lead to the problem on analysis. In this light, there is a need to quantify the socio-economic data in order to facilitate techniques for delineation of land unit and technique for quantitative analysis. The study comes out with the result that the village administrative unit can be well exerted for socio-economic land unit, although physical land unit has a detail variation. The use of secondary data of **Potensi Desa** either in rural area or in urban area, from socio-economic aspect is reasonably representative to support settlement land resources evaluation of rural as well as urban.*

INTISARI

Masalah yang sering terjadi dalam evaluasi sumberdaya lahan permukiman, adalah ketidakseimbangan antara kesesuaian secara fisik lahan, dengan kesesuaian secara sosio-ekonomis. Di samping itu permasalahan yang muncul, adalah dalam penentuan batas yang berbeda ada satuan lahan. Satuan lahan secara fisik menggunakan dasar batas fisik, sedangkan secara sosio-ekonomis mengikuti satuan luasan berdasarkan pada batas administratif. Demikian juga adanya perbedaan ketersediaan data, yakni data aspek fisik bersifat kuantitatif sedangkan data sosio-ekonomis bersifat kualitatif, sehingga merupakan masalah dalam analisisnya. Oleh karenanya, didalam teknik penentuan batas satuan lahan, serta teknik analisis kuantitatif data sosio-ekonomis memerlukan teknik kuantifikasi data kualitatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penggunaan batas administratif desa untuk satuan sosio-ekonomis lahan dapat digunakan secara tepat, walaupun satuan lahan secara fisik bervariasi secara rinci. Penggunaan data sekunder potensi desa, baik di pedesaan ataupun perkotaan dari aspek sosio-ekonomis cukup representatif untuk mendukung evaluasi sumberdaya lahan permukiman baik pedesaan maupun perkotaan.

1. Pengantar

Variasi sumberdaya lahan sangat besar. Besarnya variasi tersebut bergan-

tung pada faktor lingkungan fisik (alami dan binaan), biotik, maupun lingkungan manusia. Oleh karenanya, berbagai

informasi untuk menentukan pemanfaatan sumberdaya lahan, beserta informasi keterbatasan-keterbatasannya sangat diperlukan. Setiap faktor memiliki peranan dalam pemanfaatan lahan. Namun, derajat kepentingannya bergantung pada tujuan kegiatan, apakah untuk evaluasi, perencanaan pengembangan, atau untuk pengelolaan penggunaan lahan. Di samping itu, tingkat kepentingannya tergantung pada bentuk penggunaan lahan. Berbagai bentuk penggunaan lahan dapat disebutkan misalnya lahan untuk pertanian, kehutanan, pertambangan, perternakan, perikanan, industri, pertambangan, rekreasi (wisata), dan lahan permukiman.

Dalam perencanaan penggunaan lahan ini, diperlukan evaluasi sumberdaya lahan sebagai dasar perencanaannya. Hal ini disebabkan dalam evaluasi mempertimbangkan berbagai kemungkinan penggunaan, dan pembahasan faktor-faktor pembatas maupun pendukung, serta menterjemahkan informasi-informasi yang cukup banyak dari lahan ke dalam bentuk-bentuk yang dapat digunakan, baik oleh praktisi maupun pakar yang mempertanyakan mungkin atau tidaknya penggunaan lahan untuk tujuan tertentu. Namun demikian, masalah yang sering dihadapi hasil evaluasi sumberdaya lahan secara fisik menunjukkan kesesuaian untuk salah satu bentuk penggunaan lahan tertentu, tetapi secara sosio-ekonomis kadangkala masih belum terdapat kesesuaian.

Dalam rangka mengevaluasi sumberdaya lahan untuk permukiman, pada dasarnya mencakup dua analisis yakni analisis lahan permukiman dari aspek fisik, dan analisis lahan permukiman dari aspek sosio-ekonomis. Namun demikian, permasalahan yang muncul adalah dalam penentuan satuan analisis lahan secara fisik menggunakan dasar batas

fisik, sedangkan ketersediaan data sosio-ekonomis mengikuti satuan areal yang mendasarkan pada batas administratif. Masalah lain yang sering timbul, adalah perbedaan ketersediaan data yakni data aspek fisik bersifat kuantitatif, sedangkan sebagian data sosio-ekonomis bersifat kualitatif. Oleh karenanya, pembahasan mengenai teknik penentuan batas satuan analisis, serta teknik kuantifikasi data sosio-ekonomis dipandang cukup relevant, dan merupakan tujuan dari penulisan ini, terutama untuk mendukung teknik evaluasi sumberdaya lahan permukiman baik pedesaan maupun perkotaan.

Walaupun cukup banyak masalah yang dihadapi dalam analisis sosio-ekonomis lahan, dalam pembahasan ini dibatasi pada uraian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bahasan berikut:

- Faktor-faktor dan variabel sosio-ekonomis apa saja yang diperlukan untuk evaluasi sumberdaya lahan permukiman?
- Jenis data apa saja, dan dari mana sumber data sosio-ekonomis harus dikumpulkan?
- Bagaimana teknik kuantifikasi data kualitatif dan teknik analisis data tersebut?

Dengan pembahasan ini diharapkan mampu menunjukkan salah satu alternatif teknik analisis aspek sosio-ekonomis secara kuantitatif, sehingga dalam memadukan hasil analisis data sosio-ekonomis dengan hasil analisis data fisik lahan permukiman lebih mudah dilaksanakan.

2. Identifikasi Satuan Lahan Permukiman

Permukiman sebagai suatu ruang atau lahan terbentuk oleh unsur-unsur yang dipergunakan penduduk untuk bertempat tinggal dan menyelenggara-

kan kehidupannya. Unsur-unsur tersebut:

- lahan kerja (*working opportunities*),
- lahan transportasi dan komunikasi (*circulations*),
- lahan perumahan (*housing*),
- lahan rekreasi (*recreation*)
- lahan fasilitas lain untuk menunjang kehidupan (*other living facilities*)

Dalam hal ini satuan lahan permukiman mencakup berbagai bentuk penggunaan lahan yang dapat didelineasi atas dasar batas administratif, baik tingkat kecamatan, desa atau kalurahan.

Untuk skala yang lebih sempit (mikro) kajian permukiman menyoroti salah satu dari unsur permukiman secara rinci, terutama perumahan. Unit atau satuan analisis lebih menekankan pada lingkungan tempat tinggal baik kota ataupun desa. Komponen-komponen satuan lingkungan tempat tinggal dibatasi pada bangunan rumah, fasilitas bangunan rumah, sanitasi, lingkungan dalam pekarangan bangunan rumah dan di luarnya, serta aspek estetika dan arsitektural bangunan rumah. Dalam kaitannya dengan satuan lahan permukiman, jelas batas lebih rinci untuk setiap penggunaan lahan lebih mikro dalam skala sempit, seberapa luas untuk bangunan rumah, halaman, pekarangan (kebun), lahan fasilitas penunjang kehidupan rumah tangga dalam lahan pekarangan.

Satuan lingkungan permukiman bukan saja ditentukan oleh dukungan komponen fisik, biotik, binaan, tetapi yang sangat menentukan adalah komponen manusia sebagai penghuni maupun kelembagaannya (pemerintah). Oleh karena itu, dalam menentukan kesesuaian lahan permukiman dari aspek sosio-ekonomis, perlu memperhatikan segala faktor terutama dalam hubungannya dengan manusia dan aktifitasnya yang

memanfaatkan ruang (lahan). Dari beberapa pengertian konseptual di atas, dalam usaha menggali informasi sosio-ekonomis kesesuaian lahan permukiman perlu diidentifikasi beberapa hal, disesuaikan dengan tujuan evaluasi lahan permukiman tersebut.

Secara umum faktor sosio-ekonomis yang perlu diperhatikan dalam kaitannya satuan lahan adalah secara administratif. Dikaitkan dengan satuan lahan secara fisik, dapat saja satu satuan lahan sosio-ekonomis meliputi beberapa satuan lahan secara fisik, atau sebaliknya. Dalam hal ini ada beberapa cara untuk menyesuaikan kedua batas satuan lahan tersebut. Pertama, jika satuan lahan fisik meliputi sebagian kecil (<50% luas) satuan lahan sosio-ekonomis, maka data sosio-ekonomis mengikuti satuan lahan sosio-ekonomis yang lebih dominan (luas). Kedua, jika satuan lahan fisik meliputi sebagian besar (>50%) satuan lahan sosio-ekonomis, maka data sosio-ekonomis langsung dapat mewakili unit lahan fisik tersebut. Ketiga, jika satuan lahan fisik meliputi lebih dari dua satuan lahan sosio-ekonomis, maka batas administratif sebaiknya digunakan sebagai pembagi satuan lahan fisik tersebut, sehingga satu satuan lahan fisik dengan karakteristik fisik sama dibedakan lagi atas dasar karakteristik sosio ekonomis yang berbeda.

3. Faktor Sosio-Ekonomis Untuk Evaluasi Lahan

Dalam hubungannya dengan satuan lahan, secara umum faktor sosial dan ekonomi yang perlu diperhatikan secara umum adalah:

- a. kepadatan penduduk,
- b. mata pencaharian penduduk,
- c. tingkat ketrampilan dan pengetahuan penduduk,

- d. persepsi dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya lahan.
- e. tingkat pendapatan,
- f. keterbukaan wilayah,

Identifikasi lebih rinci dari faktor-faktor tersebut dapat ditunjukkan pada penurunannya ke variabel-variabel yang dapat diukur secara kuantitatif. Namun demikian untuk tujuan yang lebih terperinci, masih perlu untuk dimodifikasi disesuaikan dengan kondisi wilayah yang diteliti. Keenam faktor tersebut jika diturunkan ke variabel sosio-ekonomis, beserta kuantifikasinya dapat ditunjukkan pada tabel 1. Mengingat jenis dan ukuran setiap variabel pada tabel tersebut, masih terdapat beberapa kelemahan antara lain belum menunjukkan gambaran jelas tentang satuan analisis, apakah individu atau kelompok. Pada beberapa jenis variabel dapat digali datanya dari individu, tetapi sebagian lagi dapat dari kelompok. Oleh karena itu, sebelum menganalisis masih memerlukan tahap penyesuaian, minimal penggabungan atau perhitungan rata-rata dari unit individu untuk mewakili unit kelompok. Namun yang jelas, bahwa untuk data dari satuan kelompok tidak dapat digunakan secara satuan individu.

Alternatif lain dalam penentuan faktor sosio-ekonomi permukiman, yang secara sistematis dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan data sekunder, adalah menggunakan variabel-variabel sebagai indikator sosio-ekonomis. Faktor-faktor tersebut secara umum yang dapat diper-

hitungkan dalam analisis adalah sebagai berikut.

- a. Potensi Desa/Kelurahan (prasarana dan sarana).
- b. Lingkungann Perumahan (penghuni dan fasilitas rumah).
- c. Kondisi Demografis (kependudukan dan sosio-budaya)

Faktor-faktor di atas dapat digali dari permukiman desa baik di perkotaan, maupun permukiman desa di pedesaan. Untuk menunjukkan contoh yang lebih rinci, dari ketiga variabel umum di atas dapat diturunkan menjadi 25 variabel bagi permukiman desa di kota, dan menjadi 27 variabel beserta ukuran kuantitatifnya.

4. Jenis dan Sumber Data

Secara umum, data sosio-ekonomi lahan permukiman dapat dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Pemilihan jenis data yang akan digunakan dalam analisis tergantung pada skala kajian, makro, meso, atau mikro. Di samping itu, juga tergantung pada tujuan pembahasannya. Tabel 2. di samping menunjukkan jenis variabel juga dapat langsung digunakan sebagai acuan data yang harus dikumpulkan. Jika ditinjau dari jenis variabel dan data dalam tabel tersebut, tampaknya masih dapat tercukupi dari sumber data yang tertuang dalam Monografi Desa atau Kelurahan. Jika demikian halnya maka data sekunder cukup memadai untuk tujuan analisis.

Jika sebagian dari variabel atau data tersebut tidak tersedia dalam Monografi Desa atau Kelurahan, dalam rencana analisis dikehendaki analisis mikro (rinci), maka diperlukan data primer, yang harus dikumpulkan dari Responden sebagai sumber datanya. Namun jika hanya dikehendaki analisis

Tabel 1. Variabel Sosio - ekonomis Secara Umum

NO.	VARIABEL	KLASIFIKASI		
		SKOR TINGGI (3)	SKOR SEDANG (2)	SKOR RENDAH (1)
1	2	3	4	5
1.	K E P A D A T A N PENDUDUK) 550 JIWA/HA	350 - (550 JIWA/HA	(350 JIWA/HA
2.	MATA PENCAHARIAN	55 % PENDUDUK BEKERJA DI SEKTOR TERTIER	55 % PENDUDUK BEKERJA DI SEKTOR SEKUNDER	55 % PENDUDUK BEKERJA DI SEKTOR PRIMER
3.	KETRAMILAN DAN PENGETAHUAN) 60 % PENDUDUK BERPENDIDIKAN SD KE ATAS	30%-60%PENDUDUK BERPENDIDIKAN SD KE ATAS	(30 % PENDUDUK BERPENDIDIKAN SD KE ATAS
4.	PERSEPSI : P E M A N F A A T A N LAHAN	SEBAGIAN BESAR SESUAI DENGAN BIOFISIK	SEBAGIAN BESAR TIDAK SESUAI DENGAN BIOFISIK	SAMA SEKALITIDAK SESUAI DENGAN BIOFISIK
	KONSERVASI TANAH DAN AIR	PEMBUATAN TERAS + PENGUAT	PEMBUATAN TERAS TANPA PENGUAT	TANPAPEMBUATAN TERAS
5.	NILAI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN LAHAN	LAHAN BERNILAI SOSIAL BUDYA	LAHAN BERNILAI UNTUKKEPENTINGAN UMUM	LAHAN BERNILAI EKONOMIS
6.	PENDAPATAN PER- KAPITA (KG/TAHUN)	≥ 360	240 - < 360	< 240
7.	KETERBUKAAN WILAYAH	DILEWATI JALAN ASPAL	DILEWATI JALANBATU	DILEWATI JALAN TANAH

meso atau makro, dapat digunakan data yang tersedia saja untuk dianalisis, sedangkan variabel yang tidak tersedia datanya dapat ditinggalkan, sejauh tujuan secara umum dari analisis masih dapat terpenuhi.

Tabel 2 Jenis variabel, Data, dan Klasifikasi Data Sosio-ekonomi Lahan Permukiman Desa/Kota

5. KLASIFIKASI DAN ANALISIS DATA

Seperti telah dikemukakan, satuan analisis untuk data sosio-ekonomis pada umumnya unit administratif. Satuan ini dapat menggunakan tingkat kecamatan, atau tingkat desa dan atau kalurahan. Jika dikehendaki secara rinci dapat menggunakan satuan administratif kampung, RW, RT, bahkan rumah tangga. Tentu saja unit analisis kampung sampai rumah tangga, dalam pengumpulan datanya diperlukan wawancara untuk memperoleh data primer. Dalam contoh di atas (Tabel 2) satuan analisis dapat menggunakan batas administratif kecamatan, ataupun desa (kalurahan).

Atas dasar kedua puluh lima (25) variabel terukur (data) untuk desa perkotaan, dan kedua puluh tujuh (27) variabel terukur untuk desa di pedesaan (Tabel 2.), perlu dianalisis untuk dapat digunakan untuk evaluasi kesesuaian sosio-ekonomis lahan. Mengingat data sosio-ekonomis lebih banyak bersifat kualitatif, maka untuk kemudahan menentukan kesimpulan perlu dikuantifikasi. Kuantifikasi data kualitatif dilakukan secara empiris, dengan mendasar asumsi-asumsi tertentu.

Dalam kuantifikasi data ini digunakan sistem penilaian menggunakan skor tertentu terhadap setiap ukuran variabel. Untuk mengetahui ukuran tinggi-

rendahnya kelas kesesuaian sosio-ekonomi setiap daerah digunakan nilai skor total, perdesa atau per kecamatan. Skor total tersebut selanjutnya diklasifikasi, agar diperoleh jenjang tinggi-rendahnya nilai kelas kesesuaian. Penyusunan kelas kesesuaian dapat didasarkan pada rumus yang sederhana, atau dapat pula menggunakan rumus statistik.

Cara klasifikasi yang paling mudah menggunakan rumus-rumus berikut:

a. Menghitung Interval Kelas

$$I = \frac{X_{\text{MAK}} - X_{\text{MIN}}}{JK}$$

I = Interval kelas

X_{MAKS} = Skor total maksimum permukiman desa di suatu wilayah

X_{MIN} = Skor total minimum permukiman desa di suatu wilayah

JK = Jumlah kelas yang dikehendaki (lima kelas misalnya)

b. Penentuan Kelas Kesesuaian

Sebagai contoh aplikatif dari data potensi desa di seluruh kabupaten Kulonprogo tahun 1990 dapat ditunjukkan pada tabel 4. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa kabupaten Kulonprogo terdiri dari 12 satuan administratif kecamatan. Jika satuan analisis dikehendaki menggunakan administratif desa, maka dapat dibagi menjadi 88 satuan desa. Di samping itu, tabel menunjukkan hasil perhitungan skor yang cukup rinci dari tiga komponen yakni potensi desa, perumahan dan lingkungan, dan kondisi demografis, serta skor total untuk kesesuaian sosio-ekonomi. Nilai atau skor total tertinggi desa di Kabupaten Kulonprogo sebesar 80 (desa Wa-

Tabel 2. Jenis Variabel, Data, dan Klasifikasi Data Sosio-ekonomi Lahan Permukiman Desa / Kota

NO.	VARIABEL	KLASIFIKASI		
		SKOR TINGGI	SKOR SEDANG	SKOR RENDAH
1	2	3	4	5
I.	POTENSI DESA 30 20 10
1.	TIPE LKMD	TIPE 3 3	TIPE 1/2 2	TIPE 0 1
2.	JALAN UTAMA DESA	ASPAL 3	DIPERKERAS 2	TANAH 1
3.	SEBAGIAN PENDUDUK BERGANTUNG PADA POTENSI	PERDAGANGAN JASADLL 3	INDUSTRI /KERAJINAN 2	PERTANIAN 1
4.	RATA2 TANAH PERTAN. YG. DIUSAHAKAN/RT TANI UNTUK PERTANIAN) 1 HA 3	0,5 - 1 HA 2	(0,5 HA 1
5.	JARAKDARI KELURAHAN KEIBUKOTA KECAMATAN	0 - 5 KM 3	6 - 9 KM 2) 10 KM KM 1
6.	FASILITAS PENDIDIKAN	S/D SLTA KEATAS 3	S/D SLTP 2 PUSKESMAS 2	S/D SD PUSKESMAS PEMBANTU 1
7.	FASILITAS KESEHATAN	POLIKLINIK KE ATAS 3		
8.	TENAGA KESEHATAN TINGGAL DI DESA	DOKTER 3	PARAMEDIS 2	DUKUN BAYI 1
9.	SARANA KOMUNIKASI	TELEPON TERPASANG /UMUM 3	KANTOR POS 2	TIDAK ADA SARANA 1
10.	PASAR	BANGUNAN PERMANEN/SEMI PERMANEN 3	KIOS / KELOMPOK PERTOKOAN 2	TANPA BANGUNAN PERMANEN/SEMI PERMANEN 1
II.	PERUMAHAN & LINGKUNGAN 27 17 7
11.	KEPADATAN PENDUDUK PER KM	0 - 200 JIWA 4	201 - 299 JIWA 3) 300 JIWA 1
12.	SUMBER AIR MINUM	PAM. POMPA LISTRIK 3	SUMUR POMPA MATA AIR 2	AIR HUJAN, SUNGAI MUNTABER/DEMAM BERDARAH PALING SEDIKIT IX 1
13.	WABAH PENYAKIT SELAMA 1 TH. TERAKHIR	TIDAK ADA WABAH 5	SELAIN MUNTABER /DEMAM BERDARAH PALING SEDIKIT IX 2	0
14.	BAHAN BAKAR	LISTRIK / GAS 3	MINYAK TANAH 2	KAYU BAKAR 1
15.	PEMBUANGAN SAMPAH	TEMPAT SAMPAH/ DIANGKUT 3	KE DALAM LUBANG 2	KE KALI/LAINNYA 1
16.	JAMBAN	SENDIRI 3	BERSAMA-SAMA 2	LAINNYA 1
17.	PENERANGAN	LISTRIK PLN 3	LISTRIKNON PLN 2	LAINNYA / TAK ADA 1
18.	RASIO BANYAKNYA TEMPAT IBADAH PER 1000 PENDUDUK) 5/1000 3	(2-5) / 1000 2) 1/1000 1

NO.	VARIABEL	KLASIFIKASI			
		SKOR TINGGI	SKOR SEDANG	SKOR RENDAH	
1	2	3	4	5	
III.	KEADAAN PENDUDUK 31 18 6	
19.	TINGKAT KELAHIRAN ANAK KASAR PER 1000 PENDUDUK	(0-2)/1000	5 (3-9)/1000	3)10/1000	1
20.	TINGKAT KEMATIAN KASARPER1000 PENDUDUK	(0-4)/1000	5 (5-9)/1000	3)10/1000	1
21.	ENROLLMENT RASIO PENDUDUK (7-15 TH)	96-100%	5 81-95%	3 (80%	1
22.	RATA2 BANYAKNYA TERNAK /RT TERNAK) 5 EKOR	4 2-4 EKOR	2 (1 EKOR	1
23.	% RT PUNYA TV) 29%	5 5-29%	3 (5%	1
24.	% RT ADA TELEPON) 9%	3 1-9%	2 (1%	0
25.	SOSIAL BUDAYA PENDUDUK *)	B + C + D	4 B+C/B+D/C+D	2 B + C + D	1
	TAMBAHAN VARIABEL UNTUK DAERAH PEDESAAN 6 4 1	
26.	% RT PERTANIAN	15%	3 16-29%	2 30%	1
27.	ANGKUTAN PENDUDUK	OJEK SEPEDA MOTOR KENDARAAN BER - MOTOR RODA 3/4 LEBIH	3 OJEK SEPEDA MOTOR ,BECAK, GEROBAK, DOKAR, PERAHU TAK BERMOTOR, MOTOR TEMPEL, KAPAL MOTOR	2 TIDAK ADA	0
	TOTAL SKOR	DS K=88 ,DS D= 94	DS K=55, DS D=59	DS K=23, DS D=24	

Sumber : BPS , 1992

KETERANGAN :

DS K = DESA PERKOTAAN; DS D = DESA PEDESAAN

B = 8 JENIS FASILITAS DAN KEGIATAN OLAH RAGA (SEPAK BOLA, VOLI, BADMINTON, PINGPONG, BASKET, TENIS, RENANG, LAINNYA).

C = 5 ORGANISASI SOSIAL (GUDEP PRAMUKA, PANTI ASUIHAN, PANTI JOMPO, PANTI CACAT, USAHA KESEJAHTERAAN LAIN).

D = 7 JENIS REKREASI DAN KESENIAN (SANDIWARA, WAYANG ORANG, KETHOPRAK, TARI-TARIAN, MUSIK, DAN KARAWITAN).

RUMUS KLASIFIKASI :

$$I = \frac{X_{\text{MAKS}} - X_{\text{MIN}}}{JK}$$

I = INTERVAL KELAS

X_{MAKS} = SKOR TOTAL TERTINGGI PERMUKIMAN DESA DI SUATU WILAYAH

X_{MIN} = SKOR TOTAL TERENDAH PERMUKIMAN DESA DI SUATU WILAYAH

JK = JUMLAH KELAS YANG DIKEHENDAKI (DALAM HAL INI LIMA KELAS)

tes), sedangkan yang terendah sebesar 42 (desa Kalirejo).

Jika rumus a. di atas digunakan untuk menentukan lima kelas kesesuaian, maka dapat diperoleh besarnya interval kelas:

$$\frac{80 - 42}{5} = 7,6$$

Dengan demikian dapat disusun klasifikasi kesesuaian sosio-ekonomi untuk lahan permukiman (untuk prioritas pengembangan), dengan batas-batas nilai kuantitatif sebagai berikut.

Menggunakan kelas-kelas yang telah disusun tersebut kesesuaian sosio-ekonomi lahan permukiman setiap desa di kabupaten Kulonprogo dapat ditentukan. Dalam hal ini tinggal memberikan angka kelas di belakang angka total skor pada setiap desa (tabel 5). Di muka sudah disebutkan bahwa penilaian ini untuk satuan tingkat desa. Oleh karenanya jika dikehendaki satuan tingkat kecamatan, secara mudah tinggal mencari perata nilai skor total pada tingkat kecamatan, dibagi dengan jumlah daerah desa di setiap kecamatan. Hasil pembagian tersebut dibandingkan dengan nilai kesesuaian pada tabel 4, sehingga dapat diketahui untuk kecamatan tertentu terletak pada kelas kesesuaian tertentu.

6. Kesesuaian Sosio-ekonomi dan Fisik Lahan Permukiman

Perhatian yang perlu ditekankan pada penggunaan data sosio-ekonomis ada beberapa hal. *Pertama*, sifat data

yang selalu berubah setiap saat (dinamik). Data di atas adalah data tahun 1990, sehingga untuk diaplikasikan saat ini masih harus dicek kembali atas dasar data sosio-ekonomis saat terakhir (pada saat penelitian). Hal ini penting untuk mempertahankan validitas data yang dapat mewakili gambaran kondisi sosio-ekonomis saat penelitian. Dengan demikian, kondisi sosio-ekonomis untuk lahan permukiman setiap waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda, akan berbeda pula kesesuaiannya.

Kedua, adalah penggunaan satuan analisis administratif, berbeda dengan penggunaan satuan analisis lahan secara fisik, sehingga untuk menyesuaikan antara kesesuaian lahan secara fisik dengan kesesuaian lahan secara ekonomis masih memerlukan teknik (cara) tertentu dan harus hati-hati. Untuk tujuan evaluasi lahan permukiman secara umum, baik fisik maupun sosio-ekonomis, masalah batas satuan analisis ini sangat penting dan perlu diperhatikan. Satuan lahan fisik seyogyanya sebagai dasar analisis, baru diikuti satuan administratif. Dalam cara penyesuaian batas tersebut didasarkan pada prinsip dominasi, dimana luasan unit administratif terbesar mewakili kondisi sosio-ekonomis dalam luasan unit lahan.

Ketiga, penggunaan tinggi rendahnya angka skor total belum tentu semakin tinggi skornya harus dinilai semakin baik. Baik atau tidaknya, penting atau tidaknya suatu keadaan yang ditunjukkan oleh angka skor total, bergantung pada tujuan analisis, dan tujuan evaluasi. Contoh di atas menunjukkan, semakin tinggi skor total sosio-ekonomis semakin rendah prioritas pengembangan permukiman. Namun jika tujuan analisis atau evaluasi untuk penentuan penataan ulang atau pengelolaan daerah-daerah yang telah padat dihuni, tentu-

Tabel 3. Rumus Kesesuaian Sosio-ekonomi untuk Pengembangan Lahan Permukiman

Kelas	Kesesuaian	Rumus
I	Permukiman desa sangat sesuai dikembangkan	$< X_{MIN} + 1I$
II	Permukiman desa sesuai dikembangkan	$X_{MIN} + 1I - < X_{MIN} + 2I$
III	Permukiman desa cukup sesuai dikembangkan	$X_{MIN} + 2I - < X_{MIN} + 3I$
IV	Permukiman desa tidak sesuai dikembangkan	$X_{MIN} + 3I - < X_{MIN} + 4I$
V	Permukiman desa sangat tidak sesuai dikembangkan	$\geq X_{MIN} + 4I$

Tabel 4. Kesesuaian Sosio-ekonomi untuk Pengembangan Lahan Permukiman Desa Kabupaten Kulonprogo

Kelas	Kesesuaian	Batas Nilai
I	Permukiman desa sangat sesuai dikembangkan	$< 49,6$
II	Permukiman desa sesuai dikembangkan	$49,6 - < 57,2$
III	Permukiman desa cukup sesuai dikembangkan	$57,2 - < 64,8$
IV	Permukiman desa tidak sesuai dikembangkan	$64,8 - < 72,4$
V	Permukiman desa sangat tidak sesuai dikembangkan	$\geq 72,4$

Tabel 5. Nilai (Skor) Sosio-ekonomi Desa-desanya di
Kabupaten Kulonprogo

NAMA KECAMATAN DAN DESA	NILAI SKOR				Rera- ta Skor	Kelas Kese- suaian
	PD	PL	KP	Jm		
1. KECAMATAN TEMON				871	58	III
1. Temon Kulon	21	18	27	66		IV
2. Sindutan	14	19	31	64		III
3. Jangkaran	18	19	26	63		III
4. Demen	13	22	27	62		III
5. Janten	13	22	27	62		III
6. Glagah	16	22	23	61		III
7. Palihan	17	21	20	58		III
8. Kulur	13	18	26	57		II
9. Plumbon	13	18	25	56		II
10. Kalidengen	12	17	27	56		II
11. Temon Wetan	17	19	20	56		II
12. Kaligintung	13	19	23	55		II
13. Kedundang	13	19	22	54		II
14. Kebonrejo	12	19	20	51		II
15. Karangwuluh	13	18	19	50	II	
2. KECAMATAN WATES				470	59	III
16. Wates	29	22	29	80		V
17. Bendungan	22	21	21	64		III
18. Ciripeni	16	21	20	57		II
19. Ngestiharjo	12	20	24	56		II
20. Triharjo	15	19	20	54		II
21. Kulwaru	11	19	23	53		II
22. Sogan	14	21	18	53		II
23. Karangwuni	12	19	22	53		II
3. KECAMATAN PANJATAN				644	59	III
24. Panjatan	22	20	23	65		IV
25. Pleret	18	19	27	64		III
26. Bugel	14	19	29	62		III
27. Cotakan	18	19	24	61		III
28. Tayuban	14	19	28	61		III
29. Bojong	13	19	28	60		III
30. Cerme	13	18	25	56		II
31. Krembangan	13	17	24	54		II
32. Garongan	14	19	21	54		II
33. Depok	14	19	21	54	II	
34. Kanoman	12	19	22	53	II	

ESL_PER-14

4. KECAMATAN GALUR				431	62	III
35. Brosot	24	19	27	70		IV
36. Karangsewu	19	22	25	66		IV
37. Kranggan	20	20	25	65		IV
38. Nomporejo	14	19	29	62		III
39. Pandowan	17	16	27	60		III
40. Banaran	16	17	26	59		III
41. Tirtorahayu	13	15	21	49		I
5. KECAMATAN LENDAH				346	58	III
42. Bumirejo	21	21	25	67		III
43. Wahyurejo	15	22	25	62		III
44. Sidorejo	16	21	21	58		III
45. Jatirejo	17	16	21	54		II
46. Ngentakrejo	18	16	20	54		II
47. Gulurejo	14	15	22	51		II
6. KECAMATAN SENTOLO				482	60	III
48. Sentolo	24	22	20	66		IV
49. Kaliagung	17	22	26	65		III
50. Banguncipto	18	21	24	63		III
51. Srikayangan	17	21	21	59		III
52. Sukoreno	16	21	22	59		III
53. Tuksono	19	19	21	59		III
54. Demangrejo	12	21	24	57		II
56. Salamrejo	19	16	19	54		II
7. KECAMATAN PENGASIH				438	63	III
57. Pengasih	20	21	27	68		IV
58. Sendangsari	19	21	27	67		IV
59. Sidomulyo	18	22	27	67		IV
60. Margosari	18	22	23	63		III
61. Kedungsari	18	21	21	60		III
62. Tawangsari	16	21	21	58		III
63. Karangasari	13	16	26	55		II
8. KECAMATAN KOKAP				268	54	II
64. Hargomulyo	18	22	21	61		III
65. Hargorejo	25	16	19	60		III
66. Hargotirto	16	19	18	55		II
67. Kalirejo	13	15	24	42		I
68. Hargowilis	15	14	21	50		II
9. KECAMATAN NANGGULAN				342	57	II
69. Kembang	22	17	25	64		III
70. Jatisarano	23	16	24	63		III
71. Wijimulyo	20	17	24	61		III
72. Tanjungharjo	16	17	20	53		II
73. Donomulyo	13	20	18	51		II
74. Banyuroto	15	12	23	50		II
10. KECAMATAN GIRIMULYO				238	60	III
75. Giripurwo	24	19	24	67		IV
76. Jatimulyo	22	17	21	60		III
77. Pendoworejo	12	20	25	57		II
78. Purwosari	15	18	21	54		II
11. KECAMATAN SAMIGALUH				399	57	II
1R Gerboosari	24	22	27	73		III
2R Ngargoharjo	19	16	24	59		II
3R Pagerharjo	20	16	21	57		II
4R Sidoharjo	18	16	23	57		II
5R Purwoharjo	15	16	23	54		II
6R Banjarsari	15	19	19	53		II
7R Kebonharjo	13	15	18	46		I
12. KECAMATAN KALIBAWANG				248	62	III
1R Banjarsari	23	19	25	67		IV
2R Banjaroyo	24	15	23	62		III
3R Banjarharjo	20	20	22	62		III
4R Banjararum	19	15	23	57		II

demikian, perhatian terhadap hasil analisis aspek fisik lahan untuk pertimbangan perlu ditekankan.

Sebagai contoh, misalnya dalam satu satuan lahan F1-A-P adalah tanggul alam dengan tanah aluvial, dari aspek fisik untuk permukiman sangat sesuai (Kelas I). Namun dari aspek sosio-ekonomik, unit lahan tersebut mencakup 5 desa misalnya 3 desa secara utuh yang keseluruhannya tidak sesuai untuk pengembangan, sedangkan 2 desa lainnya hanya tercakup masing-masing kurang dari setengah, tetapi sangat sesuai untuk dikembangkan. Dalam hal ini pertimbangan sosio-ekonomik 3 desa tersebut yang harus digunakan dalam mendukung hasil evaluasi lahan secara fisik. Tentunya untuk menentukan prioritas pengembangan, unit lahan ini tidak direkomendasikan lagi, dengan alasan secara fisik sangat layak, ditam-

bah lagi tidak sangat layak dari aspek sosio-ekonomis, yang berarti baik potensi, lingkungan perumahan, maupun kondisi demografinya sangat sesuai.

PENUTUP

Faktor-faktor sosio-ekonomis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi lahan permukiman, pada dasarnya tidak terbatas hanya pada ukuran variabel seperti telah dikemukakan. Dapat saja dilakukan modifikasi untuk merinci atau menggeneralisasi ke ukuran yang lebih makro. Tetapi penting diperhatikan, bahwa evaluasi lahan permukiman untuk tujuan pengembangan dan pengelolaan lingkungan permukiman seyogyanya dilaksanakan secara terpadu baik dari aspek fisik maupun aspek manusia.

REFERENSI

- Anonim, **Guidelines for Rural Centre Planning**, United Nations, Economic and Social Commission for Asia and The Pacific, New York, 1979.
- Berg, Van den, **Anticipating Urban Growth in Africa: Land use and Land Values in the Rural Fringe of Lusaka, Zambia**, Zambia Geographical Association, Lusaka, 1984
- Brian, C.R., et. al., **The City's Countryside: Land and Its Management in the Rural-Urban Fringe**, Longman, London, 1982.
- Hilhorst, J.G.M, **Regional Planning: A System Approach**, Rotterdam University Press, Rotterdam, 1971.
- Nelson, de Von, **Guidelines for Rural Land Use Planning in Developing Countries**, FAO, 1986.
- Ngadiono dan Bedjo Suwandhi. 1979. **Konsep Pemikiran Metoda Standarisasi Klasifikasi Penggunaan lahan**. Bogor: Pusat Studi Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan IPB.
- Randinelli, Dennis A, **Applied methods Of Regional Analysis, The spatial Dimensions Of Development Policy**, Westview Press, Boulder Colorado, 1985
- Sitorus, R.P. Santun. 1985. **evaluasi Sumberdaya Lahan**. Bandung: Tarsito.

- Su Ritohardoyo, **Beberapa Dasar Klasifikasi Permukiman dan Pola Permukiman**, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989.
- Zonneveld, I.S. 1969. Land Evaluation. **ITC Lecture Note**. Ennschede: ITC
- Yunus, Hadi Sabari, **Geografi Permukiman dan Beberapa Permasalahan Permukiman di Indonesia**, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1987